



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Edi Saputra Matondang¹, Juniarti²

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
edisaputra@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out the implementation used in the budget directly to the performance-based budget and to analyze the effectiveness of the budget directly against the performance-based budget at the Medan Helvetia Subdistrict office. The data source of this study is sourced from secondary data, namely data obtained from documents and archives obtained from the Medan Helvetia District Office. While the data collection techniques in this study are carried out by observation, interview and documentation studies. The data analysis technique used is a comparative descriptive analysis that uses the preparation of performance-based direct spending budgets set by the general bureau and secretarial equipment of Medan Helvetia Subdistrict. The results of research obtained the Use of Budget and Expenditure of the Medan Helvetia Subdistrict Office are quite effective. Budget and spending effectiveness ratio from 2019 effectiveness ratio of 84.22%, in 2020 effectiveness ratio of 93.33%, in 2021 effectiveness ratio of 97.7%.

Keywords: *Anggaran Belanja langsung dan Anggaran Berbasis Kinerja*

PENDAHULUAN

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal yaitu : maksud dan tujuan permintaan dana, biaya dan program – program yang di usulkan dalam mencapai tujuan ini. Data kualitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap – tiap penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja adalah terlebih dahulu harus menyusun perencanaan strategi. Penyusunan dilakukan secara objektif dan melibatkans eluruh komponen yang ada dalam pemerintah dan masyarakat. Agar sistem dapat menentukan standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Seperti disebutkan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2004 pasal 3 ayat 3 didalam anggaran yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diuraikan biaya untuk masing – masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, perkiraan maju untuk tahun berikutnya serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah anggaran berbasis kinerja merupakan metode penggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian dari keluaran tersebut. Pentingnya efektivitas pengawasan anggaran dan penyusunan anggaran pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan petanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja kecamatan Medan Helvetia dituntut untuk membuat standar kinerja masing - masing.

Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja Kecamatan Medan Helvetia harus memiliki perencanaan strategik. Perencanaan strategik disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur



kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan berupa dana, sumber daya manusia, dan metode kerja.

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan ABK di dalam Kantor Kecamatan Medan Helvetia, diantaranya masih adanya anggapan bahwa anggaran merupakan “jatah” yang harus dihabiskan oleh setiap unit untuk melaksanakan kegiatannya selama satu tahun anggaran. Persoalan lain adalah terkait perumusan indikator kinerja yang belum sepenuhnya dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program. Akan tetapi dengan komitmen dan kontribusi semua pihak serta adanya dukungan perangkat peraturan yang komprehensif, dalam pemantauan diharapkan akan terus terjadi perbaikan dan kemajuan dalam penerapan ABK.

Pengawasan berbasis kinerja ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan penyimbangan saja tetapi juga berdasarkan pada tujuan yang pelaksanaan berfokus pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Walaupun penganggaran berbasis kinerja sudah dimulai sejak tahun 2015, tetapi masih kerap dijumpai penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya terdapat realisasi yang tidak dapat dipenuhi karena program atau kegiatan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan penggunaan pola pikir lama yaitu penyerapan anggaran harus 100% tanpa dibarengi pelaksanaan yang efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”. Menurut Saragih (2013:127), “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomiandaerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur-unsur APBD menurut Halim (2014:15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alato toritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktifitas pada berbagai unit kerja.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Bastian (2016) menyebutkan bahwa “anggaran berbasis



kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi”. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2012) “anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti berorientasi pada kepentingan publik”.

Menurut Halim (2017) “anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan output dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian outcome dari output tersebut”. Output dan outcome tersebut dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai.

Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator utama penganggaran berbasis kinerja adalah :

1. Perencanaan

Untuk dapat menyusun ABK, setiap organisasi harus memiliki perencanaan strategik. Perencanaan strategik disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen organisasi. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan berupa dana, sumber daya manusia, dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran yang dihasilkan peran Analisa Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan dengan terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang baru, diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk menyusun ABK.

2. Pelaksanaan

Pelaksana anggaran akan menggunakan sumber daya yang mereka akan diminta bertanggung jawab bukan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan item-item pengeluaran yang dilakukan, melainkan atas kuantitas dan kualitas hasil yang dijanjikan dari paket sumber daya yang dialokasikan bagi mereka dalam anggaran. Pelaksanaan anggaran membutuhkan adanya fleksibilitas input dimana pejabat pelaksana anggaran harus diberi fleksibilitas yang lebih besar untuk memilih belanja-belanja yang dilakukannya untuk menghasilkan pelayanan dengan cara yang paling efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi sejumlah batasan yang harus diikuti pada pengeluaran anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi (line item) pada traditional budgeting. Dibandingkan dengan traditional line-item budgeting, performance budgeting membenarkan untuk melakukan penggunaan sumber daya fiskal secara lebih fleksibel dan meningkatkan akuntabilitas terhadap hasil.

3. Pemantauan

Pemantauan anggaran disusun menurut klasifikasi belanja sampai dengan rincian objek belanja. Hal ini berimplikasi pada control yang ketat terhadap input yang mengakibatkan kurangnya fleksibilitas bagi manajer (pengguna anggaran) dalam menggunakan anggarannya. Dengan demikian, ketentuan mengenai pengeluaran anggaran yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada belum mendukung fleksibilitas pengeluaran anggaran oleh pengguna



anggaran sebagai pejabat yang mempunyai otoritas dalam melaksanakan pengeluaran anggaran.

4. Efisiensi Belanja

Efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak absolut, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah relatif lebih efisien jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

5. Capaian Program

Capaian program pelaksanaan anggaran atau Capaian kinerja keuangan menggambarkan besarnya alokasi dan penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif. Menurut Surakhmad (1992, hal.35), Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang memberikan fenomena sebagaimana adanya sesuai dengan penampakkannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu menggunakan penyusunan anggaran belanja langsung berbasis kinerja yang ditetapkan oleh biro umum dan perlengkapansektariat Kecamatan Medan Helvetia. Dengan tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data dan teori pendukung.
2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan analisis hasil penelitian.
4. Menginterpretasikan data dan mendeskripsikan hasil penelitian.
5. Memberikan Kesimpulan dan Saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil Penelitian

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas kecamatan Medan Helvetia. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran sebagai berikut:

Tabel 1. Program Untuk Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Program peningkatan pelayanan masyarakat
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan 3. Program pembinaan social kemasyarakatan kecamatan



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum pemerintah Kecamatan Medan Helvetia telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2019-2021.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antar target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Medan Helvetia tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase nilai%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	82,6	103
2	Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	%	85	77,5	91,1
3	Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	80	75	93,7
4	Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	%	80	70	87,5
Jumlah rata-rata					93,057

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama kecamatan disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja utama berkriteria tinggi sedangkan untuk indikator presentasi realisasi program prioritas musrenbang kecamatan berada pada level sedang sehingga disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator sebesar 93,07% dengan kriteria sangat tinggi.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi
2019	Rp. 602.015.400	Rp. 507.015.932
2020	Rp. 766.878.760	Rp. 731.068.934
2021	Rp. 885.412.500	Rp. 865.477.392

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan

Tahun	Target Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi
2019	Rp 1.935.166.200	Rp 1.925.918.000
2020	Rp 1.731.282.000	Rp 1.925.918.000
2021	Rp 1.630.148.759	Rp. 1.925.918.000

Analisis dan Perhitungan Efektivitas



Halim 2014 mendefinisikan efektivitas sebagai gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real pemerintah. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dan tingkat efektivitas dapat dihitung dari tahun 2019 - 2021

Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu: Menurut Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan perhitungan efektif semakin efektifitas mendekati angka 100% maka akan semakin efektif. Berikut kriteria efektivitas

Tabel 5. Indikator Efektivitas

Persentase	Kriteria	Tanda/ Kode
>100%	Sangat efektif	SE
>90%-100%	Efektif	E
>80%-90%	Cukup efektif	CE
>60%-80%	Kurang efektif	KE
>60%	Tidak efektif	TE

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2019	Rp 602.015.400	Rp 507.015.932	84,22%	Cukup efektif
2020	Rp 766.878.760	Rp 731.068.934	93,33%	Efektif
2021	Rp 885.412.500	Rp 865.477.392	97,7%	Efektif

Berdasarkan tabel dapat dilihat tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Kantor Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2019 berada pada rasio 84,22% (Cukup efektif), kemudian ditahun 2020 rasio efektifitas sebesar 93,3% (Efektif), dan tahun 2021 rasio efisiensi 97,7% (Efektif) dilihat dari jumlah target dan realisasi belanja langsung Kecamatan Medan HelvetiaPemerintah Kota Medan mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan kinerja Kantor Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan, setiap tahunnya mengalami peningkatan (Efektif).

Analisis Perhitungan Efisiensi

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi biaya pengeluaran anggaran belanja tidak langsung dengan total realisasi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung Tingkat efisiensi anggaran belanja Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan dihitung dengan membandingkan total anggaran belanja langsung belanja yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Indikator Efisiensi

Nilai Efisiensi	Kriteria
<20%	Tidak Efisien
21-85%	Efisien



>85%

Sangat Efisien

Pengukuran efisiensi:

1. Apabila hasilnya <20% berarti tidak efisien
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien
3. Apabila hasilnya > 85 % berarti sangat efisien.

Tabel 8. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan

Tahun	Target Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2019	Rp 1.935.166.200	Rp 1.925.918.000	99,52%	Sangat efisien
2020	Rp 1.731.282.000	Rp 1.925.918.000	100%	Sangat Efektif
2021	Rp 1.630.148.759	Rp. 1.925.918.000	100%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung Kantor Kecamatan Medan Helvetia pada tahun 2019 berada pada rasio 99,52% (sangat efisien), kemudian tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 100 (sangat efisien), dan tahun 2021 rasio efisiensi 100% (sangat efisien) dilihat dari jumlah target dan realisasi belanja tidak langsung Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan yang baik.

Pembahasan

Indra (2006) menjelaskan bahwa efektivitas adalah keberhasilan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Efisiensi merupakan hal terpenting, karena suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiennya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program pada dua organisasi yang berkecimpung dalam industri yang sama dapat diperbandingkan tingkat efisiennya. Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu dibandingkan hasil rasio program yang sama diorganisasi lainnya, program tersebut bisa disebut lebih efisien.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu, kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dwi Nofita Sari (2018) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Hasil dari penelitian yang digunakan menunjukkan hasil analisis perhitungan tingkat efisien dan efektivitas belanja terlihat pemerintah Kota Samarinda telah melakukan efisiensi belanja



yang dibuktikan dengan tingkat efisiensi dari tahun 2011 sampai 2015 sudah efektif.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja terhadap instansi pemerintahan. Perbedaannya yaitu dari hasil penelitian sebelumnya tidak efisien dikarenakan adanya program belanja yang tidak direalisasikan dan beberapa program lain yang realisasinya tidak optimal sehingga tidak mencapai target.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran dan Belanja Kecamatan Medan Helvetia tergolong efektif. Rasio efektivitas anggaran dan belanja dari tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 84,22%, tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 93,33%, tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 97,7%. Tingkat efektivitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintahan kecamatan dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah.
2. Penggunaan Anggaran dan belanja Kecamatan Medan Helvetia tergolong efisien. Rasio efisiensi anggaran dan belanja dari tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 99,52%, tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 100% tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 100%. Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Saran Akademik
 - a. Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variabel lain yang lebih relevan terkait dengan Anggaran dan Belanja.
 - b. Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatori dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.
2. Saran Operasional
Kecamatan Medan Helvetia, diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan pembangunan dan pengelolaan anggaran dan belanja daerah agar bisa lebih efektif dan efisien setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yunita dan Puranta, Hendra, 2010. Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: RinekaCipta.



- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Bastian, Indra dan Suharjono. 2016. Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama. Jakarta:Salemba Empat
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2009. Akuntansi Biaya, edisi I, Mitra Wacana, Media, Jakarta.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2016. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Moore, Kenneth D. 2015. Effective Instructional Strategies From Theory to Practice. (London: Sage Publications, Inc.)
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011. Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- M Nafarin, 2012, "Penganggaran Perusahaan", Salemba empat, Jakarta.
- Moeherton. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siegel, Shim. 2011. Kamus Istilah Akuntansi Terjemahan Moh. Kurdi. Jakarta. Gramedia.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed. Bandung: Alfabeta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Surat Putusan Mendagri Nomor 1-3 Tahun 2000 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004.
- Rahayu, Sri & Rachman, A.A. 2013. Penyusunan anggaran perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rampengan, M. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, (online), Vol.16 No. 03 Hal. 616- 623. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 25 April 2020).
- Rudianto, 2013. Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, Jakarta: Erlangga.
- Siregar, Baldric, 2017. Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2009. Manajemen Keuangan Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wibowo, 2014. Manajemen Perubahan, Edisi ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.